



**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI
HASIL PEMBICARAAN TK.I/PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI
Tanggal 21 September 2023**

**Oleh:
Ketua Badan Anggaran DPR RI
MH. Said Abdullah
Nomor Anggota : A-224**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**
LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I/PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

Kamis, 21 September 2023

Bismillahirrahmannirrahim

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,
Om Swastyastu, Namu Buddhaya, dan
Salam Kebajikan**

**Yth. Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan,
Yth. Saudari Menteri Keuangan RI,
Yth. Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas,
Yth. Saudara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Atas berkenan-Nyalah kita masih diberikan nikmat sehat, dan kesempatan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional yang diamanahkan kepada kita semua. Ucapan syukur juga kita panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan lampu terang, sehingga kita bisa menuntaskan pembahasan RUU APBN 2024.

Rasa terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah dan seluruh panitia kerja di Badan Anggaran DPR RI, serta seluruh komisi atas proses pembahasannya yang cukup panjang terkait RUU APBN 2024. Kita mengharapkan postur RAPBN 2024 ini kredibel, sehat dan berkesinambungan untuk menjawab tantangan tahun depan, serta meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah telah semaksimal mungkin melihat berbagai kemungkinan tantangan pada tahun depan sebagai kerangka mitigasi dalam menyusun postur RAPBN 2024.

Sejak pecahnya perang Rusia dan Ukraina, tantangan perekonomian nasional telah bergeser, dari pandemi Covid-19 menjadi dampak ketegangan geopolitik. Ketegangan geopolitik tampaknya tidak akan segera mereda, dan berpotensi mengganggu rantai pasok (*supply chain global*). Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah sangat mewaspadai

ketegangan geopolitik merambah ke kawasan Laut Natuna Utara, antara Tiongkok dan Amerika Serikat beserta sekutunya.

Faktor ekonomi domestik Tiongkok dan Amerika Serikat yang cenderung tidak stabil harus kita waspadai. Ekonomi Tiongkok yang biasa tumbuh tinggi, kini cenderung terkoreksi sejak mencuatnya kasus kredit properti Evergrande dan Country Garden.

Demikian halnya dengan Amerika Serikat yang belum berhasil menaklukkan inflasi sesuai target mereka ke level 2 persen. Yang terjadi dalam dua bulan terakhir inflasi mereka kembali naik dari 3,2 persen menjadi 3,7 persen. Padahal The Fed telah 11 kali menaikkan suku bunga acuannya ke level 5,5 persen. Tampaknya suku bunga tinggi akan terus mereka tahan dalam waktu lama (*higher for longer*).

Situasi yang dialami kedua negara itu tentu akan memberi efek rambatan (*spillover effect*) terhadap perekonomian nasional kita. Kita tidak ingin situasi itu membuat perekonomian nasional terimbas secara *weaker for longer*, khususnya pada urusan ekspor-impor, dan nilai tukar.

Badan Anggaran DPR RI sangat mengapresiasi langkah diplomasi Pemerintah di berbagai forum global untuk meredakan ketegangan politik. Langkah ini jelas membuka asa baru untuk menahan para adidaya unjuk kuasa. Keseriusan Pemerintah mendorong anggota G20 dan ASEAN plus untuk mempererat kerjasama ekonomi akan menjadi bekal penting kelangsungan pertumbuhan nasional, regional dan global.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Tantangan kedepan sangatlah tidak mudah, Dana Moneter Internasional memperkirakan PDB Indonesia pada tahun 2024 akan tumbuh sebesar 5 persen, sedangkan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB nasional hanya 4,9 persen. Kendati proyeksi kedua lembaga tersebut atas PDB Indonesia lebih rendah, namun Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI sepakat mematok target pertumbuhan ekonomi lebih optimistik dan kalkulatif sebesar 5,2 persen.

Badan Anggaran DPR RI terus mendorong Pemerintah untuk memecahkan segala hambatan pertumbuhan. Lewat pendekatan *growth diagnostics*, sesungguhnya Pemerintah telah mengidentifikasi hambatan hambatan tersebut. Saat ini kita sedang menempuh jalan transformasi struktural untuk menyingkirkan halang-rintang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kendati perekonomian nasional selama ini “hanya” tumbuh 5 persenan, pencapaian itu jauh lebih baik dengan negara-negara maju dan sebagian negara *peers*. Kita juga berhasil melalui tantangan silih berganti yang tidak mudah diselesaikan. Pada tahun 2018 kita menghadapi imbas perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat. Pada tahun 2020 -2022 kita berjibaku mengendalikan pandemi. Belakangan kita dihadapkan konflik geopolitik, yang eskalasinya sangat berpotensi meluas ke Asia Timur.

Menghadapi situasi yang tidak mudah ini, kita harus bersyukur perekonomian bangkit lebih kuat, bisa kembali tumbuh 5 persen. *The Economist* mencatatkan Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kelima diantara 30 negara dengan perekonomian terbesar di dunia sejak 2014.

Sidang Dewan yang terhormat,

Mempertimbangkan keseluruhan tantangan, kesiapan mitigasi risiko, sekaligus modal yang kita miliki, Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah menetapkan berbagai indikator pada Asumsi Dasar Ekonomi Makro tahun 2024, sebagai berikut:

1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2
2	Inflasi (%)	2,8	2,8
3	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000	15.000
4	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,7	6,7
5	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (US\$/Barel)	80	82
6	Lifting Minyak Bumi (ribu barel per hari)	625	635
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.033	1.033

Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah menyepakati usulan kenaikan harga minyak mentah, dari 80 US\$/barel menjadi 82 US\$/barel. Skenario ini mempertimbangkan keputusan sejumlah negara OPEC yang akan mengurangi produksi minyak bumi karena faktor geopolitik, dan dampak potensi perlambatan ekonomi Tiongkok dan global.

Untuk memenuhi kebutuhan minyak bumi di dalam negeri, melalui pembahasan yang seksama, Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI sepakat untuk menaikkan target *lifting* minyak bumi dari rencana semula 625 ribu barel/hari menjadi 635 ribu barel/hari. Untuk mencapai target ini, Pemerintah harus mendorong pertumbuhan operasi pada sektor hulu minyak bumi. Langkah ini mengantisipasi menipisnya produksi dari lapangan minyak bumi kita yang sudah tua.

Bapak/Ibu Anggota Dewan yang mulia,

Memerangi kemiskinan dan pengangguran merupakan mandat konstitusi. Oleh sebab itu, agenda berkelanjutan menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial menjadi tugas yang terus kita dedikasikan sepanjang hayat. Atas dasar itu, Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Pemerintah mematok sejumlah target indikator kesejahteraan rakyat, sebagai berikut:

Sasaran dan Indikator Pembangunan Tahun 2024

1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0 - 5,7	5,0 - 5,7
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 - 7,5	6,5 - 7,5
3	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	na	0-1
4	Gini Rasio (indeks)	0,374 - 0,377	0,374 - 0,377

5	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	73,99 - 74,02	73,99 - 74,02
6	Nilai Tukar Petani (NTP)	105 - 108	105 - 108
7	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107 - 110	107 - 110

Keinginan kuat Pemerintah meninggalkan *legacy* penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan patut kita dukung. Tingkat kemiskinan per Maret 2023 masih dikisaran 9,36 persen atau 25,9 juta penduduk. Badan Anggaran DPR RI mendukung target besar Pemerintah untuk mencapai target tingkat kemiskinan turun ke level 6,5-7,5 persen, dan mencantumkan target penurunan kemiskinan ekstrem turun ke level 0-1 persen, yang tidak dicantumkan dalam RAPBN 2024.

APBN 2024 akan menjadi modal penting bagi Pemerintah melunasi janji kepada rakyat, sebelum demisioner pada Oktober 2024. Target Pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrem di level 0-1 persen, menurunkan prevalensi stunting ke level 14 persen, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap diatas 5 persen, inflasi berada di level rendah patut kita dukung.

Tingkat kemiskinan ekstrem pada September 2023 berada pada kisaran 1,74 persen, prevalensi stunting pada akhir tahun 2022 sebesar 21,6 persen, dan ditargetkan turun 17 persen pada 2023. Rasanya dengan *best effort*, Pemerintah bisa merealisasikan janji diatas.

Karena itu, tiada hal yang pantas kita berikan kecuali sepenuhnya mendukung pihak yang hendak melunasi janji. Namun sebagai teman sejati, wajiblah nasihat-nasihat baik harus tetap kita sampaikan, meskipun terkadang hal itu terasa pahit. Tapi yakinlah, hal itu diniatkan baik kepada Pemerintah. Bukankah letak dasar amalan yang baik harus didirikan atas niat yang baik pula.

Kami teringat syair peribahasa dari sastrawan Madura, KH. Zawawi Imron, “jika dubur ayam yang bisa menghasilkan telur lebih mulia daripada orang yang hanya bisa menjanjikan telur, maka berhentilah berjanji. Lakukanlah yang bisa dilakukan. Sebab, derajat kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita janjikan. Tindakan kita sangat menentukan siapa diri kita”. Kita yakin tahun 2024, bukanlah tahun janji bagi Pemerintah, namun tahun pembuktian atas terlunasinya janji.

Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah memiliki pemahaman bersama untuk melanjutkan konsolidasi fiskal yang berkualitas. Tujuan dari agenda ini untuk memperkuat mobilitas pendapatan negara. Tumpuan pendapatan negara harus kita letakkan dalam kerangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan, dan pembenahan struktural terhadap skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), termasuk kontribusi besar BUMN.

Mobilitas pendapatan juga kita harapkan terus meningkat dari dividen BUMN. Namun ada tugas strategis BUMN yang tidak sekedar mengejar laba. BUMN adalah tangan Pemerintah dalam menjalankan tugas menguasai cabang-cabang produksi yang penting, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Karena tanggung jawab konstitusional inilah, BUMN

harus menjelma menjadi agen penting pembangunan dan berkontribusi lebih luas bagi kesejahteraan rakyat.

Kami sepakat dengan Pemerintah agar terus menciptakan mobilitas tingkat pendapatan negara. Oleh sebab itu, Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah mematok target pendapatan negara pada tahun 2024 seperti yang terinci dibawah ini:

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	RAPBN 2024	Kesepakatan
A. Penerimaan Pajak	1.986.879,9	1.988.879,9
B. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	320.980,0	320.980,0
C. Penerimaan Negara Bukan Pajak	473.019,6	492.003,8
D. Penerimaan Hibah	430,6	430,6
Pendapatan Negara	2.781.310,1	2.802.294,3

Atas dorongan Badan Anggaran DPR RI, Pemerintah menyepakati untuk meningkatkan target pendapatan negara surplus Rp20,98 triliun dari rencana awal. Kenaikan pada target penerimaan pajak sebesar Rp2 triliun dan PNBPN sebesar Rp18,98 triliun.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah juga menyepakati postur belanja negara pada tahun 2024, sebagaimana yang tertuang dalam uraian dibawah ini

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	RAPBN 2024	Kesepakatan
A. Belanja K/L	1.086.624,9	1.090.831,2
B. Belanja Non K/L	1.359.918,6	1.376.696,4
1. Program Pengelolaan Utang	497.319,6	497.319,6
2. Program Pengelolaan Hibah	6,6	6,6
3. Program Pengelolaan Subsidi	282.743,9	285.972,0
4. Program Pengelolaan Belanja Lainnya	419.692,3	415.879,4
5. Program Pengelolaan Transaksi Khusus	160.156,2	177.518,8
C. Transfer ke Daerah	857.591,7	857.591,7
Belanja Negara	3.304.135,2	3.325.119,3

Postur belanja negara terdapat peningkatan sebesar Rp20,98 triliun dari RAPBN 2024 yang telah disepakati Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah. Peningkatan terdapat pada pos belanja non K/L, belanja subsidi untuk rakyat serta pos belanja transaksi khusus. Sebaliknya terjadi pengurangan pada pos belanja lainnya.

Arah Kebijakan belanja negara pada tahun 2024 ditujukan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, melalui penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas SDM, mempercepat

pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi sejumlah aturan dan penguatan institusi, serta pengurangan kesenjangan antargolongan dan antarwilayah.

Secara khusus Badan Anggaran DPR RI memberikan dorongan afirmatif agar Pemerintah melaksanakan perluasan dan percepatan program pembangunan listrik desa (lides) terutama untuk daerah kategori 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) yang belum mendapatkan akses listrik. Pelistrikan di kawasan ini untuk memperkuat tujuan pembangunan Indonesia sentris.

Untuk menjalankan kebijakan mandatori bidang pendidikan dan kesehatan, Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah menyepakati anggaran pendidikan sebesar Rp665,02 triliun atau 20,0 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun. Anggaran pendidikan ini untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat dan daerah, termasuk Dana Abadi Pendidikan yang di dalamnya termasuk Dana Abadi Pesantren, Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi.

Anggaran kesehatan dalam APBN tahun 2024 kami sepakati bersama Pemerintah sebesar Rp187,46 triliun, atau 5,6 persen dari total belanja negara. Anggaran kesehatan secara rutin untuk pemeliharaan kesehatan rakyat. Selain itu difokuskan untuk penajaman lokasi dan intervensi untuk menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan rujukan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; dan penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Sidang Dewan yang kami muliakan

Arah kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2024 kita dorong untuk sejalan dengan target prioritas pembangunan nasional, yakni menghapuskan kemiskinan ekstrem, menurunkan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, mendanai kegiatan produktif dengan dampak *multiplier* yang terukur, dan meningkatkan investasi di daerah.

Anggaran TKD tahun 2024 kami sepakati bersama dengan Pemerintah sebesar Rp857,59 triliun, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp427,69 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp188,10 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp143,09 triliun, Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Rp18,27 triliun, Dana Keistimewaan DI Yogyakarta sebesar Rp1,42 triliun, Dana Desa (DD) sebesar Rp71 triliun, dan Insentif Fiskal sebesar Rp8 triliun.

Sidang Dewan yang terhormat,

Badan Anggaran DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati besaran defisit APBN 2024 sebesar Rp522,82 triliun (2,29 persen terhadap PDB, dengan perkiraan PDB nominal 2024 sebesar Rp22.830,8 triliun).

Untuk menopang kebijakan defisit APBN 2024, Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Pemerintah menyepakati kebutuhan pembiayaan tahun 2024 yang meliputi Pembiayaan

utang disepakati sebesar Rp648,08 triliun yang terdiri dari (1) SBN netto sebesar Rp666,45 triliun dan (2) Pinjaman Netto sebesar negatif Rp18,36 triliun, dan Pembiayaan Non Utang sebesar minus Rp125,26 triliun yang terdiri dari (1) Pembiayaan Investasi sebesar minus Rp176,22 triliun; (2) Pemberian Pinjaman sebesar minus Rp0,25 triliun; (3) Kewajiban Penjaminan sebesar Rp0,82 triliun; (4) Pembiayaan Lainnya sebesar Rp52,03 triliun, yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp51,38 triliun dan Hasil Pengelolaan Aset sebesar Rp0,65 triliun.

Agar kebijakan utang kita terkelola dengan baik pada jangka panjang, Badan Anggaran DPR RI mendorong Pemerintah sesegera mungkin merumuskan *roadmap* kebijakan pembiayaan utang sebagai bagian dari kebijakan fiskal jangka pendek, dan menengah-panjang, yang akan menjadi panduan dalam rekomendasi kebijakan mitigasi utang.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Pada kesempatan ini, kami hanya menyampaikan beberapa pendapat dan catatan dari pendapat mini fraksi-fraksi sebagai sikap akhir fraksi terhadap RUU APBN TA 2024 yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI, antara lain:

- 1) **Fraksi PDI Perjuangan** berpendapat bahwa dalam tahun terakhir pemerintahan, Pemerintah harus dapat menuntaskan berbagai permasalahan yang masih menghambat urusan-urusan rakyat dalam mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, bantuan usaha, bantuan pupuk, urusan perizinan, urusan listrik untuk rakyat, urusan listrik desa, dan urusan layanan publik lainnya. Pemerintah harus meninggalkan *legacy* landasan yang kuat bagi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Fraksi PDI Perjuangan juga berpendapat pelaksanaan Kebijakan Dana Desa harus dapat meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, bansos, serta pemberdayaan.
- 2) **Fraksi Partai Golkar** meminta agar Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, serta dapat melakukan operasi pasar dengan efektif dan efisien. Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kesepakatan belanja negara yang telah mencakup penambahan anggaran untuk kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri sebesar Rp9,4 triliun. Fraksi Partai Golkar juga mengapresiasi kesepakatan pembiayaan anggaran melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp51,4 triliun, yang diharapkan dapat mendorong pengelolaan APBN yang lebih sehat dan berkelanjutan.
- 3) **Fraksi Partai Gerindra** mendorong Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas penganggaran dan realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di daerah dan peningkatan pencapaian indikator kesejahteraan yang lebih optimal. Komitmen *spending better* dan serapan anggaran TKD yang berkualitas jelas sangat mendukung

pelaksanaan desentralisasi fiskal, sehingga proses pembangunan di daerah termasuk wilayah pedesaan dapat terus berlangsung dengan baik. Fraksi Partai Gerindra berpandangan belanja pendidikan sebagai *mandatory spending* sebesar 20% dari total APBN perlu diimbangi dengan kualitas pendidikan yang terus meningkat lebih baik. Dalam hal anggaran kesehatan, Fraksi Partai Gerindra berharap agar anggaran kesehatan agar dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah *stunting*, meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan terutama di wilayah kepulauan dan daerah 3T.

- 4) **Fraksi Partai NasDem** berpendapat Pemerintah agar mendorong agroindustri dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap proses hilirisasi sektor pangan sebagai upaya pemenuhan bahan kebutuhan pokok, perluasan kesempatan kerja dan usaha, pemberdayaan produksi dalam negeri, perolehan devisa, pengembangan sektor ekonom lainnya, serta perbaikan perekonomian masyarakat di pedesaan. Lebih lanjut, Fraksi Partai NasDem memandang bahwa anggaran subsidi yang awalnya digunakan untuk mobil listrik lebih baik disalurkan ke sektor-sektor produktif yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti sektor pertanian. Pemerintah juga diharapkan memperluas cakupan jaminan sosial tenaga kerja kepada kelompok petani, nelayan, pekebun, peternak dan UMKM sebagai strategi jaring pengaman sosial pencegahan kemiskinan.
- 5) **Fraksi PKB** mendorong Pemerintah untuk menjaga stabilisasi harga pangan ditengah perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu dengan meningkatkan produksi pangan dalam negeri agar tidak membuat guncangan ekonomi terutama pada kelompok menengah ke bawah. Dalam hal belanja Bidang Pendidikan, Fraksi PKB juga meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan nasib Guru Sertifikasi Non Inpassing yang telah lama tidak terselesaikan dan belum mendapatkan SK. Selain itu, Fraksi PKB juga meminta kepada Pemerintah agar APBN sebagai *shock absorber* tetap memberikan bantuan sosial yang dapat menjadi *social safety net*, mengingat tahun 2024 ketidakpastian global masih tinggi dan di dalam negeri memasuki tahun politik, sehingga Pemerintah harus meningkatkan ketepatan sasaran dari program bantuan sosial. Fraksi PKB juga berpendapat agar Dana Desa terus ditingkatkan hingga mencapai 5 miliar per desa, agar desa dapat menjadi tulang punggung perekonomian dan peningkatan pemerataan pembangunan.
- 6) **Fraksi Partai Demokrat** berpendapat Pemerintah agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara, penguatan belanja yang berkualitas, dan memastikan setiap penggunaan anggaran berdasarkan '*spending better*' yang prioritas, efektif dan efisien. Fraksi Partai Demokrat berpendapat angka defisit dan inflasi perlu dijaga agar tidak menggerus kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, Pemerintah juga harus berhati-hati dalam mengelola utang dalam pembayaran pokok utang dan bunganya, agar tidak menjadi beban APBN. Selain itu, untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada Pemerintah untuk tetap fokus dalam program *'Pro-Growth with equity, Pro-Poor, Pro-Jobs, and Pro-Environment'* serta lebih memperhatikan pengembangan dan pemeliharaan museum agar mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pembangunan peradaban manusia di Indonesia.

- 7) **Fraksi PKS** memberikan 30 (tiga puluh) catatan antara lain Pemerintah harus meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi sehingga tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan pendapatan dapat diturunkan secara signifikan. Sedangkan kesejahteraan dan petani, nelayan, serta daya beli rakyat harus dapat ditingkatkan. Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah memberi insentif PPh atas honor yang diterima para kader posyandu, dan kader/relawan pegiat sosial lain yang dibiayai APBD/Dana Desa. Sehingga tidak ada pengurangan berupa pungutan PPh atau yang lainnya. Lebih lanjut, Fraksi PKS berpendapat target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2024 harus tercapai, dan Pemerintah harus mempercepat perbaikan IPM di daerah-daerah yang memiliki IPM di bawah nasional.
- 8) **Fraksi PAN** mendorong agar pertumbuhan ekonomi dapat semakin inklusif dengan mendorong UMKM sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka pengangguran. Dengan meningkatnya subsidi energi tahun 2024, Fraksi PAN meminta agar Pemerintah dapat mengarahkan subsidi listrik untuk diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan miskin serta menyesuaikan tarif bagi pelanggan non subsidi untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tahun depan.
- 9) **Fraksi PPP** menekankan pentingnya Pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap guru di sektor keagamaan, yakni guru ngaji yang selama ini berperan besar dalam masyarakat tapi belum tersentuh kebijakan dan anggaran Pemerintah. Selain itu, Fraksi PPP berpendapat perlu adanya peningkatan anggaran untuk program-program perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk memastikan bahwa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Berikut kami laporkan Sikap Fraksi atas RUU APBN TA 2024 yang disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, yaitu:

1. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PPP menyetujui atau menerima RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

2. Fraksi PKS menerima dengan catatan (*minderheid nota*) atas RUU APBN TA 2024 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna.

Pimpinan Dewan, Para Anggota dan hadirin yang berbahagia,

Badan Anggaran DPR dan Pemerintah menyadari bahwa RAPBN 2024 direncanakan dan akan kita jalankan pada tahun politik, kemungkinan pelaku usaha masih *wait and see*, sambil menunggu kepemimpinan nasional yang terpilih definitif. Namun demokrasi kita telah tumbuh baik dan stabil, sehingga pemilu dan bisnis bisa terus berjalan beriring.

Proses pemilu tidak untuk di khawatirkan oleh pelaku usaha, justru dari pemilu banyak pelaku usaha mendapatkan peluang bisnis baru. Pemilu justru kita harapkan menjadi daya ungkit tingkat konsumsi, dan ikut berkontribusi menggerakkan usaha UMKM yang memang menjadi tulang punggung serapan tenaga kerja.

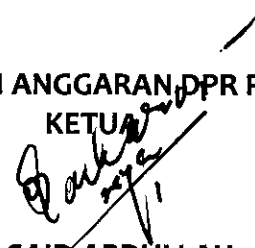
Mengakhiri Laporan Badan Anggaran DPR RI atas hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024, kami selanjutnya menyerahkan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, untuk mendapatkan persetujuan

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR, tiada kata yang patut kami ucapkan selain terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran, Pimpinan Dewan, Pimpinan dan Anggota Komisi I s.d Komisi XI, dan Pimpinan Fraksi atas kerjasamanya dalam pembahasan RUU APBN TA 2024.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada media massa yang telah menyebarkan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga akhirnya selesai. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, kami mohon maaf jika dalam penyampaian laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan kepada Ibu/Bapak Anggota Dewan yang terhormat.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

BADAN ANGGARAN DPR RI,
KETUA

MH.SAID ABDULLAH
A-224